



LAPORAN KINERJA Tahun 2023

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2023 telah melaksanakan amanat terkait Manajemen Kinerja ASN dan Transformasi SKP sesuai dengan Peraturan Menteri Menpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai untuk pegawai Basarnas. Selain itu penggunaan Aplikasi E Kinerja BKN dan Aplikasi E Performance merupakan aplikasi yang dipergunakan sebagai dasar manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungan Basarnas

Pada Tahun 2022, terdapat Perubahan Renstra (Review Renstra) yang disusun berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 22 Agustus 2022. Salah satunya adalah perubahan Struktur Organisasi yang semula **Biro Perencanaan dan Kerjasama** menjadi **Biro Perencanaan dan Keuangan**

Perubahan Indikator IKU dan Manual IKU yang semula mengikuti aturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No : SK.KBSN-78/PR .02.02/XI/BSN-2022 menjadi SK.KBSN-20278/PR.02.02/XI/BSN-2023 Tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Manual IKU. Berikut adalah Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berikut adalah Rangkuman Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yang telah sesuai dengan PK Tahun 2023 .

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET PK	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pecarian dan Pertolongan	100	100	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	72	73,72	102,39%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET PK	Realisasi 2023	Capaian (%)
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	95,46	100,48%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%	<5%	100%
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100	100	100%
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80	94	117,5%
		Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	92,56	108,89%
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNPB	100	643%	643%
		Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

Dilihat dari hasil evaluasi Indikator Kinerja dari tiap-tiap pelaksanaan sasaran, dan target dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2023, maka tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan dapat dikatakan memuaskan, **Total Rata-rata Capaian adalah 163% atau Lebih dari 100%,**. Dimasa mendatang kiranya kondisi ini akan dipertahankan dan bahkan jika mungkin ditingkatkan

Capaian terbaru di Biro Perencanaan dan Keuangan adalah Basarnas **mendapat Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPP) Basarnas sebesar 97,98** dari Kementrian Bappenas Tahun 2023. Ini adalah Capaian yang cukup membanggakan walaupun indikator ini belum dijadikan bagian dari Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2023 telah disesuaikan dengan Perubahan Struktur Organisasi Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 22 Agustus 2022. Semula Biro Perencanaan dan Kerjasama menjadi Biro Perencanaan dan Keuangan.

Laporan hasil evaluasi ini juga menjadi dasar penilaian sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Tata Cara Penetapan Kinerja ASN, yang artinya Basarnas telah meningkatkan kualitas pengukuran kinerja berkala yang tidak terbatas pada realisasi keuangan dan fisik, namun mengacu pada ketercapaian PK atau SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan memanfaatkan hasil pengukuran tersebut sebagai dasar pemberian penghargaan bagi pegawai dalam bentuk Predikat Kinerja Pegawai.

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Basarnas selama Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara berkelanjutan.

Jakarta, Februari 2024

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Siswanta SE

Marsekal Pertama TNI

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
1. Kedudukan	3
2. Tugas	3
3. Fungsi	3
4. Struktur Organisasi	3
C. PERMASALAHAN UTAMA	4
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
1. Visi Misi Tujuan Sasaran dan Indikator	7
2. Aktivitas Kegiatan pendukung Sasaran	18
3. Prosedur Pengumpulan Data.....	21
B. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA	26
B. PENGUKURAN KINERJA	27
1. Sasaran 1: Meningkatnya Evaluasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Kinerja dan Keuangan	27
a. Capaian SK 1.....	27

b. Analisis SK 1.....	33
2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lembaga.....	39
a. Capaian SK 2.....	39
b. Analisis SK 2.....	43
3. Sasaran 3: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.....	47
a. Capaian SK 3.....	47
b. Analisis SK 3.....	53
C. REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. CAPAIAN TERKAIT MANAJEMEN KINERJA ASN.....	64
C. TRANSFORMASI SKP,,,,,,,,,,,,,,,,,.....	66
D. UPAYA PERBAIKAN CAPAIAN KINERJA	66
E. TINDAK LANJUT HASIL EVALUSI AKIP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN oleh APIP BASARNAS.....	68

LAMPIRAN :

PENGUKURAN KINERJA SESUAI PERJANJIAN KINERJA 2023

HASIL CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

TAHUN 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan.....	4
Gambar 2.1.	Tujuan dan Sasaran Basarnas.....	9
Gambar 2.2.	Tujuan dan Sasaran Biro Perencanaan dan Keuangan.....	9
Gambar 2.3.	Prosedur Pengumpulan Data	21
Gambar 2.4.	<i>Cascading</i> Sasaran	22
Gambar 2.5.	Perjanjian Kinerja 2023.....	23
Gambar 2.6.	Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2022.....	25
Gambar 3.1.	Hasil SAKIP	30
Gambar 3.2.	Peningkatan Nilai SAKIP dan RB.....	31
Gambar 3.3.	Hasil Nilai NKA	32
Gambar 3.3.	Nilai IKPA.....	49
Gambar 3.3.	Opini BPK.....	52
Gambar 4.1.	Impelementasi Penyusunan SKP.....	..64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Cascading Sasaran Strategis, Program, Kegiatan.....	10
Tabel 2.2.	Review IKU ke 2 Tahun 2021.....	14
Tabel 2.3.	Reviu IKU ke 2 Tahun 2022.....	15
Tabel 2.4.	Definisi dan Rumus Perhitungan Indikator Kinerja.....	16
Tabel 2.5.	Sasaran Kegiatan, Indikator dan Aktivitas Biro Renkeu	18
Tabel 2.6.	Detail Kinerja Berbasis Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan.....	18
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	25
Tabel 3.2.	Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1).....	27
Tabel 3.3.	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran.....	29
Tabel 3.4.	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran.....	33
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1).....	34
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1).....	35
Tabel 3.7.	Kegiatan dan Aktivitas dalam mendukung Sasaran	37
Tabel 3.8.	Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK.2).....	39
Tabel 3.9.	Jumlah Satker yang tepat waktu pengumpulan data.....	42
Tabel 3.10.	Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan 2 (SK2).....	43
Tabel 3.11.	Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK 2).....	43
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK 2).....	44
Tabel 3.13.	Kegiatan dan Aktivitas dalam mendukung Sasaran 2.....	46
Tabel 3.14.	Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK 3).....	48
Tabel 3.15.	Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3).....	53
Tabel 3.16.	Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3).....	57
Tabel 3.17.	Kegiatan dan Aktivitas dalam mendukung Sasaran 3.....	57
Tabel 3.18.	Realisasi Anggaran9 Biro Perencanaan dan Keuangan.....	58
Tabel 3.19.	Realisasi Anggaran Per Kegiatan / Aktivitas dalam Rencana Aksi.....	61
Tabel 4.1.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi APIP.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden No 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) telah mengembangkan SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya pemerintahan yang baik dan dipercaya. Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Basarnas akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif terhadap masyarakatnya, terbuka, di percaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Jajaran Basarnas memahami lingkup akuntabilitas kinerja Basarnas yang meliputi semua kegiatan dan sasaran dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kegiatan yang menjadi perhatian utama adalah mengenai tugas dan fungsi, program kerja yang menjadi isu nasional, dan aktivitas dominan serta vital bagi pencapaian Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

SAKIP ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 4 Tahun 2016 tentang Implementasi sistem SAKIP di Lingkungan Badan SAR Nasional bahwa Unit kerja eselon II diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja dan anggaran. Sejauh ini Langkah yang telah Basarnas lakukan antara lain :

1. Memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan; langkah nyaranya adalah pengisian E Kinerja BKN sudah memperhatikan PK dari Pimpinan Langsung secara *Cascading dan Crosscutting*
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja berkala yang tidak terbatas pada realisasi keuangan dan fisik, namun mengacu pada ketercapaian PK atau SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Selanjutnya, agar memanfaatkan hasil pengukuran tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment, langkah konkritnya adalah melakukan pemantauan secara berkala dalam menentukan Capaian Kinerja Organisasi dan pemberian Predikat bagi seluruh pegawai Basarnas sesuai SE Kemen PAN RB No 3 Tahun 2023
3. Melanjutkan proses integrasi aplikasi e-performance dan meningkatkan kepatuhan seluruh unit kerja dan UPT dalam melakukan pelaporan maupun update data capaian kinerja berkala, sehingga dapat menghasilkan informasi kinerja yang memadai; Langkah nyata adalah Pengisian E performance yang semakin lengkap mulai dari Perencanaan.
4. Memanfaatkan hasil pengukuran berkala sebagai bahan pengambilan keputusan atau penyesuaian strategi dalam mencapai target program dan kegiatan eksisting sebagai upaya perbaikan pengelolaan manajemen kinerja. Langkah nyata adalah Pimpinan menilai Langsung Rencana Hasil Kerja dan memberikan penilaian sesuai SE Kemen PAN RB No 3 Tahun 2023. Pemantauan secara Berkala untuk menghasilkan SKP ASN secara berkala.
5. Menginput berkas ke ESR KemenPANRB mulai dari : Renstra, IKU, PK, RKT, Rencana Aksi dan Pemantauan, DPA/POK, *Cascading*, LHE dan TL dari Inspektorat, Monev (Laporan Kinerja) Triwulan 1, 2,3 dan 4, Pedoman Teknis Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan data Kinerja serta Pedoman Evaluasi SAKIP Internal

B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 22 Agustus 2022. Salah satunya adalah perubahan Struktur Organisasi yang semula **Biro Perencanaan dan Kerjasama** menjadi **Biro Perencanaan dan Keuangan** berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Utama Basarnas. Biro Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana kinerja dan anggaran; Penyiapan koordinasi rencana, program dan anggaran;
2. Penyiapan penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta penyiapan penyusunan program dan rencana anggaran;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, anggaran dan kinerja;
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro



1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Pengalihan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tersebut mendorong perubahan birokrasi Basarnas menjadi lebih efektif dan efisien. Pengalihan tersebut diikuti dengan penetapan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK-KBSN-197/OT.05/IX/BSN- 2020 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di lingkungan Kantor Pusat, serta pelantikan para pemangku jabatan fungsional dan jabatan struktural pada Desember 2020.

Jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan pada Tahun 2023, sebanyak 44 orang yang terdiri dari:

- | | | |
|---|------|-------|
| a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan | : 1 | Orang |
| b. Jabatan Fungsional Tertentu | : 21 | Orang |
| c. Jabatan Pelaksana | : 20 | Orang |
| d. PPNPN | : 2 | Orang |

Dengan klasifikasi:

- | | | |
|---------------------------|------|-------|
| a. Berdasarkan Pendidikan | | |
| 1. SLTA | : 1 | Orang |
| 2. Sarjana Muda / DIII | : 1 | Orang |
| 3. Sarjana / S1 | : 31 | Orang |
| 4. Magister / S2 | : 10 | Orang |
| 5. TNI | : 1 | Orang |

C. PERMASALAHAN UTAMA

Beberapa permasalahan yang dihadapi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Belum maksimalnya Kompetensi SDM yang andal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Kurang optimalnya pemahaman posisi strategis Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mengoordinasikan perencanaan anggaran dan

pengelolaan keuangan di Basarnas. Sehingga masih kesulitan terhadap data dan ketepatan waktu laporan. Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki wewenang untuk mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada unit kerja di lingkungan Basarnas. Posisi ini merupakan posisi yang strategis bagi Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mengatur sistem dan prosedur perencanaan dan keuangan serta pemantauan dan evaluasi sehingga unit kerja taat pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Jumlah SDM yang masih kurang mencukupi

Tingginya beban kerja Biro Perencanaan dan Keuangan belum diimbangi dengan jumlah pegawai yang mencukupi. Pegawai mengalami kelebihan beban pekerjaan yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan menjadi kurang maksimal karena pegawai hanya memiliki waktu yang terbatas untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Maka dari itu, beban kerja yang berlebihan berdampak langsung pada kinerja organisasi. Keluhan dari stakeholders terkait layanan perencanaan dan keuangan, human error, dan turunnya standar pekerjaan merupakan akibat yang mungkin dapat terjadi jika permasalahan tidak segera diantisipasi.

4. Pemenuhan sarana dan prasarana yang belum optimal

Saat ini Biro Perencanaan dan Keuangan tengah mengalami kendala terkait ketidaktersediaan ruang arsip yang layak sedangkan kebutuhan akan ruang arsip aktif amat mendesak. Akibatnya, banyak arsip yang menumpuk di ruang-ruang kantor dan menyebabkan arsip tidak teratur dengan baik.

5. Sarana dan prasarana lain yang belum optimal adalah sarana digital atau Sistem Informasi internal yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi. Sarana digital tersebut sangat berguna dalam meminimalisir human error, menyamakan persepsi dan sharing data antar unit di bawah Biro Perencanaan dan Keuangan yang hingga saat ini belum dapat terealisasi. Kelemahan tersebut

membuat tingkat kecepatan kerja menjadi lambat dan tidak efisien, yang pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan Biro Renkeu Basarnas

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja ini terdiri dari 4 Bab

1. Bab I Pendahuluan memuat Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Strategis memuat Peta Strategis Basarnas, ringkasan ikhtisar RENSTRA Basarnas, Cascading dari Sasaran Program ke sasaran Kegiatan, perjanjian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan. Capaian Output Kegiatan serta Kegiatan/ Aktivitas yang akan dijadikan Rencana Aksi dalam mencapai Sasaran Kegiatan.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat:
 - A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - B. Pengukuran Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang Capaian dan Analisis pencapaian kinerja
 - C. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja
4. Bab IV Penutup memuat simpulan umum atas capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu juga membahas Capaian Kinerja terkait Manajemen Kinerja ASN , Transformasi SKP dan tindak lanjut LHE APIP Basarnas
5. Lampiran memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

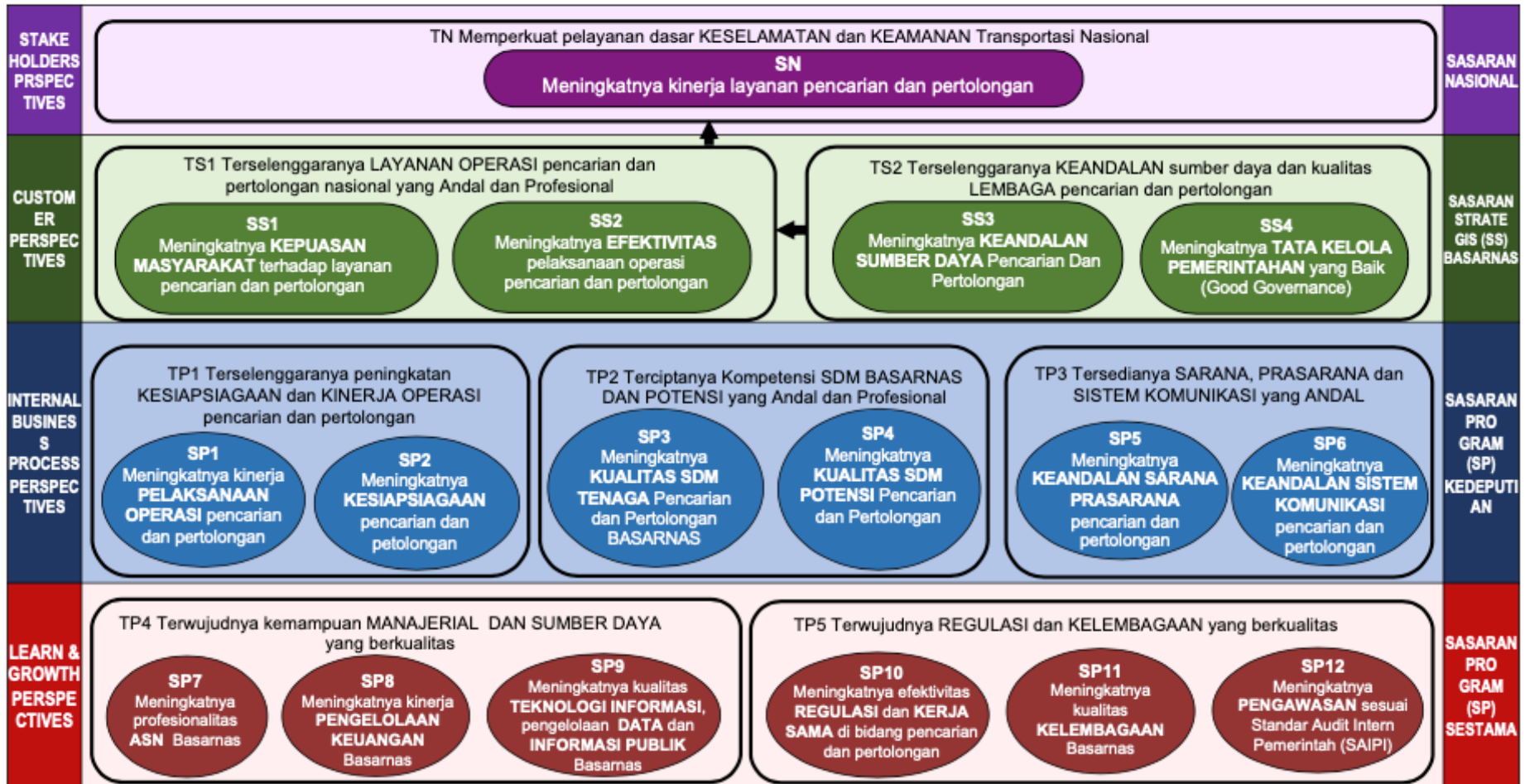
Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan Keuangan 2023-2024 telah direvisi untuk revisi ke 3. Renstra Birorenkeu disusun berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 22 Agustus 2022. Salah satunya adalah perubahan Struktur Organisasi yang semula **Biro Perencanaan dan Kerjasama** menjadi **Biro Perencanaan dan Keuangan**. Visi Misi masih sesuai dengan Visi Misi lembaga.

1. Visi Misi Tujuan Sasaran dan Indikator

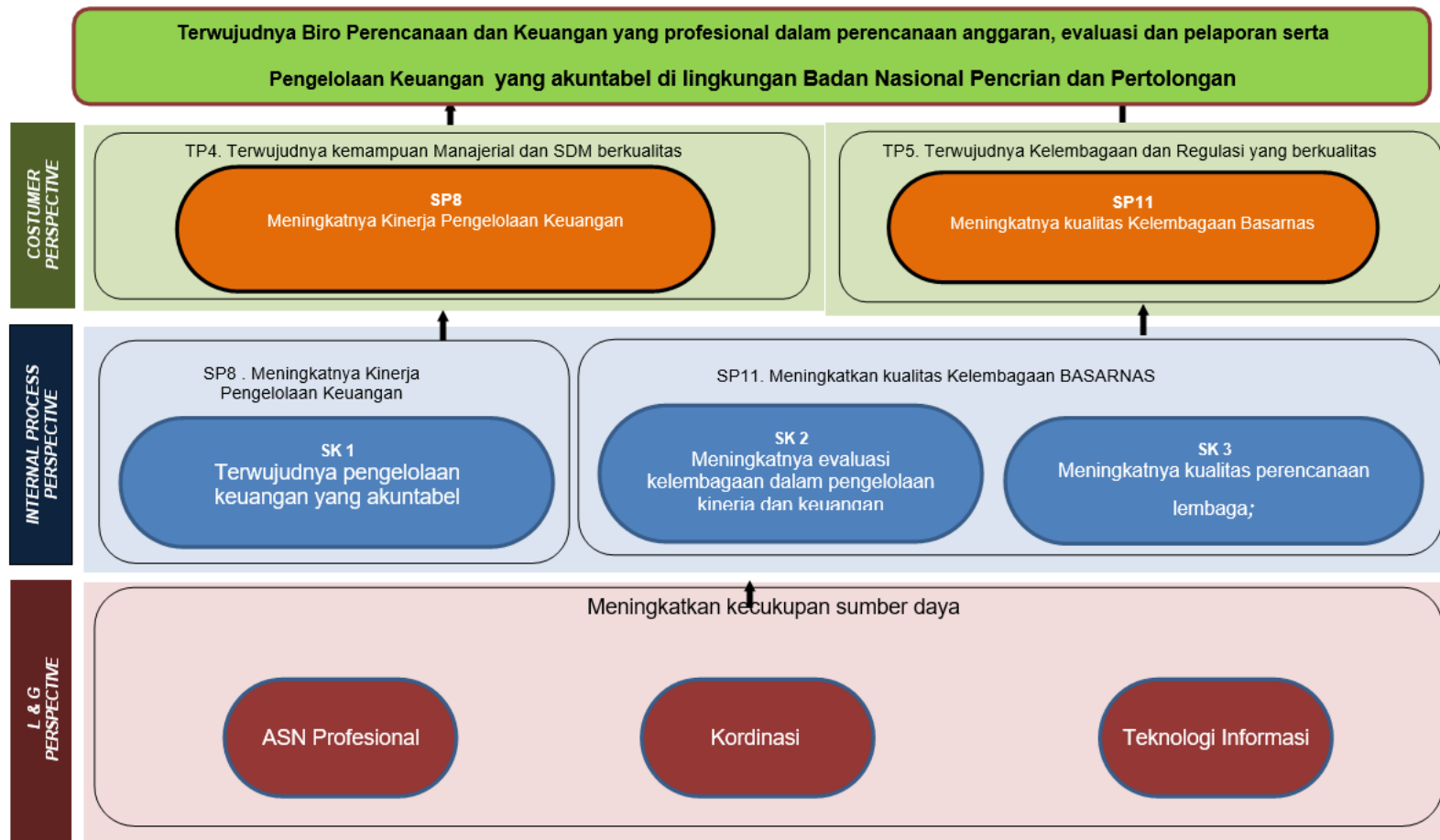
Penyusunan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan memperhatikan/ mengacu Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan *perubahan (Review)* Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024. Visi Basarnas : Terwujudnya Pencarian dan Pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung pencapaian Visi Misi Presiden dan wakil Presiden “Indonesia yang Maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” Misi Basarnas adalah :

- Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia
- Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Gambar 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024



Gambar 2.2 Tujuan dan Sasaran Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai turunan dari Sekretariat Utama

Tabel 2.1 Cascading Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Revisi			Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020 s.d 2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan					2.253.648	2.267.460	1.967.177	1.888.027	4.434.938	
SASARAN STRATEGIS LEMBAGA										
	SS.4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)									BASARNAS
	IKSS.7 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi				76	76				Sekretaris Utama
PROGRAM 2 : Program Dukungan Manajemen										
					747.861	859.573	907.507	860.202	1.367.805	
	SP.8 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan									Sekretariat Utama
	IKSP.8.2 Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				WTP	WTP				Biro Renkeu)
	SP.11 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan									Sekretariat Utama
	IKSP.11.1 Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				BB	BB				Biro Renkeu

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Revisi			Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020 s.d 2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 12 : Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Pengelolaan Keuangan					16.793	18.571	16.415	543.581	755.837	
	SK.11.1.1 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan									Biro Renkeu
	IKSK.11.1.1.a Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				100	100				
	IKSK.11.1.1.b Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja				72	73				
	IKSK.11.1.1.c Nilai atas evaluasi kinerja anggaran				95	95				
	SK.11.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga									Biro Renkeu
	IKSK.11.2.1.a Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)				< 5 %	< 5 %				
	IKSK.11.2.1.b Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program				100	100				
	SK.8.2.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel									Biro Renkeu

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Revisi			Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020 s.d 2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSK.8.2.2.a Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP		80	80						
	IKSK.8.2.2.b Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		85)	85						
	IKSK.8.2.2.c Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNB		100	100						
	IKSK.8.2.2.d Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		WTP	WTP						

Pada Tahun 2021 Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan reuiu atas Indikator Kinerja (Revisi 2) dengan dasar:

1. Surat Kementerian PANRB Nomor B/86/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Rekomendasi yang terdapat pada surat dimaksud antara lain: melakukan perbaikan atas Indikator Kinerja pada Unit Kerja yang belum memenuhi kriteria Indikator Kinerja yang baik, maupun yang belum cukup untuk menggambarkan kinerja yang diharapkan pada Unit Kerja tersebut.
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor: 6 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
3. SK.KBSN- 78/PR .02.02/XI/BSN- 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Manual IKU

Pada Tahun 2022 Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan reuiu atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja (Revisi 3) yang cukup mendasar dengan dasar acuan :

1. **Adanya perubahan (Reuiu)** Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.
2. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 22 Agustus 2022. Salah satunya adalah perubahan Struktur Organisasi yang semula **Biro Perencanaan dan Kerjasama** menjadi **Biro Perencanaan dan Keuangan**

Tabel 2.2 Reviu Tahun 2021 (Revisi ke2)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		SEMULA	MENJADI	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya Regulasi dan Kelembagaan Yang Berkualitas	SK.1. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase tingkat kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	A. Persentase kerja sama di bidang SAR	100%	100%	100%	100%	
	SK.2. Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	2. Persentase pemantauan pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	3. Persentase satuan kerja yang menyampaikan dokumen SAKIP tepat waktu dan sesuai NSPK / persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada seluruh UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	B. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	70	73	73,5	74
				C. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,3	70,5	71,0	71,5
				D. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,5	7,8	8,0	8,2
				E. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94	94,5	94,8	95
	SK.3. Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	5. Persentase pemenuhan target pendanaan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	6. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	F. Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	100%	100%	100%	100%
				G. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%	100%
				H. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3 Review IKU ke 3 Tahun 2022

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan / AKTIVITAS		Target 2023	Target 2024
SK. 11.1.1	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	IKSK. 11.1.1.a	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan BNPP	100	100
		IKSK. 11.1.1.b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .	72	73
		IKSK. 11.1.1.d	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	95
SK. 11.1.2	Meningkatnya Kualitas perencanaan lembaga	IKSK. 11.1.2.a	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	< 5 %	< 5 %
		IKSK. 11.1.2.b	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100	100
SK. 8.2.2	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	IKSK. 8.2.2.a	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80	80
		IKSK. 8.2.2.b	Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	85
		IKSK. 8.2.2.c	Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN	100	100
		IKSK. 8.2.2.d	Opini BPK RI atas laporan keuangan Basarnas	WTP	WTP

Perubahan Indikator beserta Manual IKU yang tertuang dalam SK.KBSN No-78/PR.02.02/II/ BSN-2022 tentang INDIKATOR KINERJA BASARNAS dan MANUAL IKU di rubah menjadi menjadi No SK.KBSN- 202/PR.02.02/XI/BSN-2023. Kegiatan / aktifitas dan Langkah langkah strategis dalam mendukung Sasaran dan meningkatkan Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tertuang pada table berikut :

Tabel 2.4 Definisi dan Penjelasan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / AKTIVITAS		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 11.1.1 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	IKSK. 11.1.1.a	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan BNPP	persentase	Mengukur rata-rata kesesuaian antara target dengan capaian kegiatan/fisik, dan kesesuaian antara target dengan capaian anggaran. Pengendalian program dan anggaran dilihat dari hasil pemantauan monitoring, pemantauan aplikasi, dan laporan berkala.
	IKSK. 11.1.1.b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja	nilai	Mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja dari Kementerian PAN-RB
	IKSK. 11.1.1.d	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	nilai	Mengukur penilaian kinerja anggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai kinerja anggaran
SK. 11.1.2 Meningkatnya Kualitas perencanaan lembaga	IKSK. 11.1.2.a	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	persentase	Mengukur persentase jumlah anggaran yang diblokir dalam DIPA $\% = \left(\frac{\text{Jumlah anggaran yang diblokir}}{\text{Jumlah pagu anggaran pada DIPA}} \right) \times 100$
	IKSK. 11.1.2.b	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	persentase	Mengukur persentase jumlah unit kerja yang tepat waktu dalam menyampaikan data usulan rencana dan program
SK.	IKSK.	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI dan	persentase	Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibagi total temuan dan dikalikan 100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / AKTIVITAS		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
8.2.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	8.2.2.a	hasil Audit APIP		
	IKSK. 8.2.2.b	Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Nilai indeks dari kementerian Keuangan dalam aplikasi OMSPAN (Monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara) ON LINE
	IKSK. 8.2.2.c	Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPNP	persentase	Realisasi Penerimaan PNBPNP/ Target yang diterima dikalikan 100%
	IKSK. 8.2.2.d	Opini BPK RI atas laporan keuangan Basarnas	Opini	Indeks dari BPK sesuai hasil penilaian sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan

2. Aktivitas Kegiatan pendukung Sasaran

Aktivitas pendukung sasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian atau peningkatan indikator sasaran. Indikator sasaran adalah parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan atau target tertentu. Aktivitas pendukung sangat penting dalam konteks mencapai indikator sasaran karena mereka memainkan peran kunci dalam memfasilitasi dan mempercepat pencapaian tujuan atau target yang ditetapkan

Tabel 2.5 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Aktivitas Biro Renkeu

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	Target sesuai PK 2023	AKTIVITAS (DIPA/POK)
1.	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
				Rapat Kerja Basarnas
				Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian	72	Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja	
			Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja	
	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%	penyusunan laporan analisa IKPA pada aspek kualitas perencanaan anggaran, indikator Deviasi Halaman III DIPA
				Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas
				Rancangan Teknokratik Renstra Basarnas Tahun 2025-2029
				Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL
				Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran
				Pembinaan Aparatur Perencanaan
	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100	Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL	
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80	Seluruh Komponen dalam Substansi Sistim Akutansi Internal (SAI)
		Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	Seluruh Komponen dalam Substansi ANGGARAN dan substansi PERBENDAHARAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	Target sesuai PK 2023	AKTIVITAS (DIPA/POK)
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBP	100	Seluruh Komponen dalam Substansi ANGGARAN dan substansi PERBENDAHARAAN
		Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	Seluruh Komponen dalam Substansi Sistim Akutansi Internal (SAI)

Berikut ini adalah RO (Capaian OUTPUT) Fisik, anggaran Pagu Awal dan Target Kinerja 2023 untuk aktivitas yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

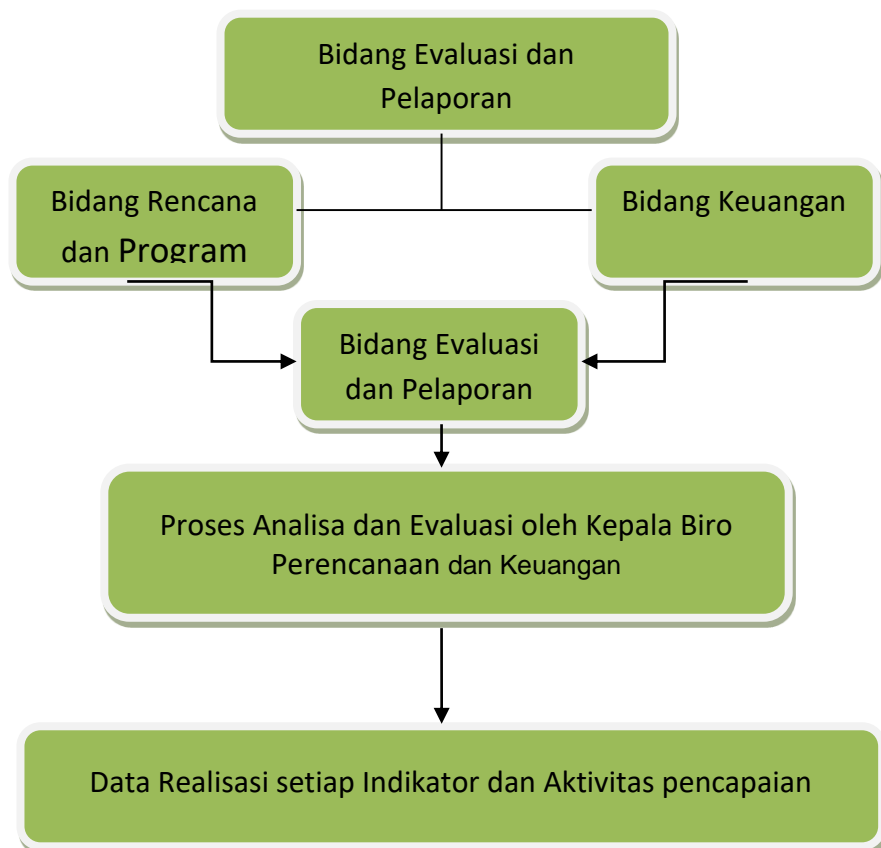
Table 2.6 Detail Kinerja Berbasis Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK 2023	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU	TARGET RO	PAGU
						AWAL
1	2	3	4	7	8	9
1	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pecarian dan Pertolongan	100%	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	1 dok	500.000.000
				Rapat Kerja Basarnas	1 dok	300.000.000
				Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	1 dok	610.000.000
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	72	Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja	1 dok	500.000.000
				Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja	1 dok	100.000.000
				Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%	penyusunan laporan analisa IKPA pada aspek kualitas perencanaan anggaran, indikator Deviasi Halaman III DIPA	1 dok	
				Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas	1 dok	716.956.000
				Rancangan Teknokratik Renstra Basarnas Tahun 2025-2029	1 dok	500.000.000
				Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL	1 dok	1.263.640.000
				Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran	1 dok	280.464.000
				Pembinaan Aparatur Perencanaan		233.182.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK 2023	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU	TARGET RO	PAGU
						AWAL
1	2	3	4	7	8	9
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL	1 dok	1.263.640.000
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	80 WTP	Perencanaan/ Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah	1 dok	88.016.000
				Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)		48.000.000
				Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	144.000.000
				Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	91.546.000
				Pendampingan Tim Pemeriksa	1 dok	98.000.000
				Peningkatan Kompetensi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	25.334.000
				Reviu Laporan Keuangan	1 dok	72.000.000
				Publikasi Laporan Keuangan		96.000.000
				Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	64.800.000
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN	100%	Penyusunan Jenis dan tarif PNBPN	1 dok	223.000.000
		Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	Pengelolaan dan Evaluasi Revisi Anggaran	1 dok	238.086.000
				Peningkatan Kompetensi Anggaran	1 dok	28.800.000
				Koordinasi Pelaksanaan Anggaran	1 dok	213.540.000
				Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran	1 dok	280.000.000
				Pembekalan Pengelola Anggaran	1 dok	142.000.000
				Monitoring Bendahara Pengeluaran (Uji Petik)	1 dok	138.000.000
				Pengelolaan PNBPN	1 dok	28.800.000
Pengelolaan Rekening Pengeluaran Lingkup Basarnas	1 dok			24.384.000		
Pengelola Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan	1 dok			72.000.000		
Layanan Perkantoran	1 dok			70.729.770.000		
Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kantor Pusat	1 dok	48.000.000				

3. Prosedur Pengumpulan Data

Pencatatan dan pengumpulan data diperoleh dari masing-masing bidang di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu, bidang rencana dan program, serta bidang evaluasi dan pelaporan dan bidang keuangan. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Prosedur pengumpulan data dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

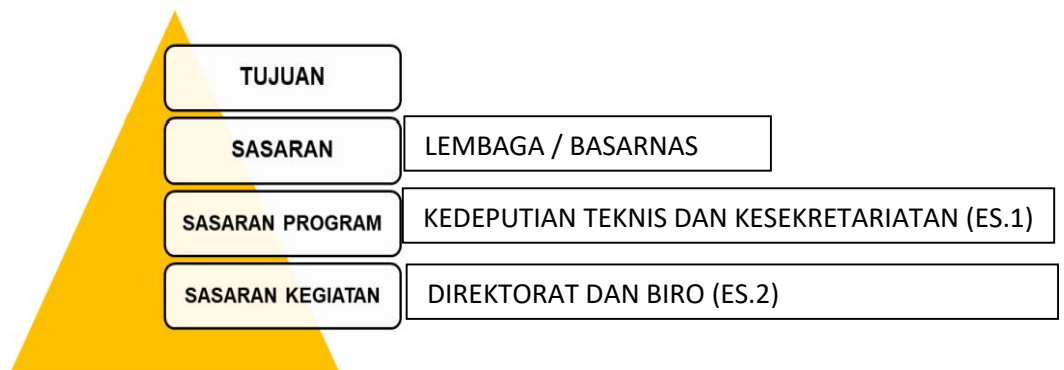


Gambar 2.3 Prosedur Pengumpulan Data

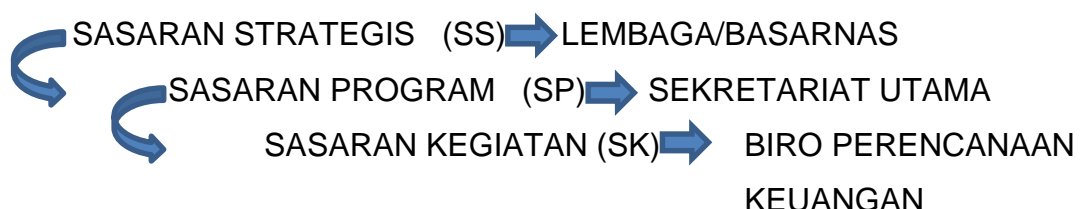
Basarnas mengembangkan **aplikasi e-Performance**, data-data Indikator Kinerja tertuang di dalam aplikasi dan pemantauannya serta pengendaliannya dilaksanakan setiap Triwulan selama Tahun 2023.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja dalam pelaksanaan tugas yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



Perjanjian Kinerja untuk pejabat dibawah Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan ini disusun secara berjenjang dan selaras dengan menggunakan *Balance Score Card* (Peta Strategis dan Pohon Kinerja) yang tertuang dalam Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan



Gambar 2.4 Cascading Sasaran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Roy Romanza
 Jabatan : Sekretaris Utama
 selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Abdul Haris Achadi
 Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

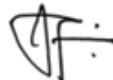
Pihak Kedua,

 Abdul Haris Achadi
 Pembina Utama Madya (IV/d)

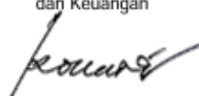
Jakarta, Januari 2023
 Pihak Pertama

 Roy Romanza
 Marsekal Pertama TNI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	72
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80
		Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPNP	100
		Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP

Pagu Anggaran : Rp 249.233.642.000,-

Sekretaris Utama

 Abdul Haris Achadi
 Pembina Utama Madya (IV/d)

Jakarta, Januari 2023
 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

 Roy Romanza
 Marsekal Pertama TNI

Gambar 2.5 PenandatangananPe

NO	KRO - RO	PAGU AWAL	BLOKIR/TRANSFER	PAGU AKHIR
I	GAJI DAN HONOR	241.705.094.000	170.975.324.000	70.729.770.000
A	Gaji dan tunjangan	240.376.894.000	170.975.324.000	69.401.570.000
B	Honor Pengelola Anggaran	1.328.200.000	0	1.328.200.000
II	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.994.242.000	268.182.000	2.726.060.000
III	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.360.000.000	350.000.000	2.010.000.000
IV	Layanan Manajemen Keuangan	2.164.306.000	0	2.164.306.000
TOTAL		249.223.642.000	171.593.506.000	77.630.136.000

Pada awal tahun Anggaran 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan Pagu awal sebesar Rp. 77.630.136.000,-

- a. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Rp. 2.010.000.000,-
- b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Rp. 2.726.060.000,-
- c. Layanan Keuangan Rp. 2.164.306.000
- d. Gaji dan Tunjangan Rp. 70.729.770.000,-

Gaji tunjangan semula Rp. 241.705.094.000 Menjadi Rp. 70.729.770.000,- sebesar Rp. 170.975.342.000 dikirim ke daerah / UPT pada bulan Maret 2023

Dalam Penyusunan SKP 2023 melalui E Kinerja BKN, PK ini telah dijadikan Dasar sebagai penyusunan Indikator sampai dengan Individu dan dijadikan Dasar Penilaian Capaian Kinerja Organisasi oleh Pimpinan Eselon 1 dan memberikan Predikat kepada seluruh pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan baik untuk Triwulan I, II, III, IV dan Tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri Menpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai



Gambar 2.6 Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada TA 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA

Tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis diukur dari capaian kinerja suatu organisasi. Capaian kinerja organisasi dihitung berdasarkan keberhasilan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam merealisasikan Indikator Kinerja dari target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dari pencapaian Indikator Kinerja tersebut difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, sedangkan Indikator Kinerja lainnya merupakan pendukung dari tercapainya IKU tersebut.

Secara garis besar rata-rata capaian kinerja pada IKU Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar 163%. Pencapaian terbesar yaitu Pendapatan PNBPN yang baru pertamakali dilakukan dan hasilnya diatas target yang telah direncanakan yaitu 634%.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET PK	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100	100	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	72	73,72	102,39%
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	95,46	100,48%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET PK	Realisasi 2023	Capaian (%)
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%	<5%	100%
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100	100	100%
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80	94	117,5%
		Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	92,56	108,89%
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBP	100	643%	643%
		Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

B. PENGUKURAN KINERJA

1. Sasaran Pertama yaitu "Meningkatnya Evaluasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Kinerja dan Keuangan"

a. Capaian

Sasaran ini didukung oleh 3 indikator kinerja, yaitu Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta nilai atas evaluasi kinerja anggaran. Adapun capaian indicator untuk sasaran 1 tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK.1)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya evaluasi kelembagaan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran	100%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	72	73,72	102,39%
	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	95,46	100,48%

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan” didukung oleh Indikator Kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pengukuran indikator ini dihitung dari rata-rata hasil penilaian kinerja UPT Kategori Perencanaan dan Evaluasi. Penilaian kinerja UPT untuk kategori tersebut terdiri dari Aplikasi pemantauan kinerja

- Aplikasi *e-Performance*
- Aplikasi Smart-DJA
- Aplikasi eMonev Bappenas

Untuk Pencapaian Indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pecarian dan Pertolongan. Dilakukan pengawasan, monitoring dan kesesuain program dan anggaran. Verifikasi Data sampai mulai TW1 s/d TW4 jumlah Satker yang telah sesuai pelaksanaan Program dan Anggarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran

Satker	Jumlah	Kesuaian Program dan Anggaran	Persentase
UPT	44	44	100%
Unit Kerja Kantor Pusat	13	13	100%
		total	100%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan

Kegiatan yang mendukung Sasaran ini adalah Rapat Kerja di awal tahun, Penilaian UPT oleh seluruh Unit Kerja Kantor Pusat, Monitoring dan Laporan-laporan yang diperlukan.

Terkait Pemantauan pengisian aplikasi-aplikasi dan penyusunan Laporan laporan dalam mendukung Laporan Pusat, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan Pemantauan terhadap 44 UPT dan 13 Unit Kerja di kantor Pusat, baik pemantauan di WA Group, melalui *Luring, Daring* maupun Monitoring langsung pada beberapa Kantor Unit Pelayanan Teknis sebagai uji petik. Memastikan bahwa seluruh aplikasi terisi dan seluruh laporan tersusun sesuai kaidah dan format peraturan yang berlaku

2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun hasil penilaian SAKIP Tahun 2023 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23,51	23,68
b. Pengukuran Kinerja	30	21,60	21,93
c. Pelaporan Kinerja	15	10,84	10,91
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,11	17,20
Nilai Hasil Evaluasi	100	73,06	73,72
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

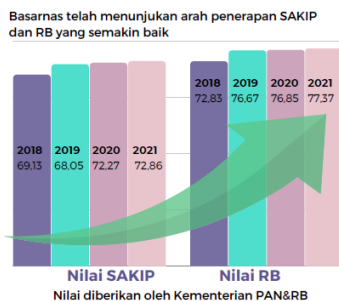
Gambar 3.1 Hasil SAKIP

Penyampaian dokumen SAKIP tepat waktu harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Ketentuan (NSPK) yang berlaku.

Dasar hukum penyusunan SAKIP yang ada di Basarnas antara lain :

- a) Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 4 Tahun 2016 tentang Implementasi Sistem SAKIP di Lingkungan Badan SAR Nasional.
 - b) Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK.KBSN-231/PR.02.01/XII/BSN-2022 tentang Buku Pedoman Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - c) Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan NOMOR: SK.KBSN- 202/PR.02.02/XI/BSN-2023 tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024
 - d) Petunjuk Teknis NOMOR : JUKNIS - 3 TAHUN 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peningkatan Nilai SAKIP sangat mendorong semangat Basarnas dalam usah terus meningkatkan Kinerja melalui

Manajemen Kinerja dan meningkatkan Nilai SAKIP. Berikut adalah Peningkatan Nilai SAKIP dan RB Basarnas



Gambar 3.2 Peningkatan Nilai SAKIP dan RB

Dokumen SAKIP yang disusun telah di sampaikan ke Kementerian PANRB melalui aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id). Dokumen SAKIP tersebut diantaranya yaitu:

- a) Reviu Rencana Strategis 2023-2024
- b) IKU
- c) RKT
- d) PK
- e) Rencana Aksi dan Pemantauan RA per Triwulan
- f) Laporan Kinerja Tahunan dan 4 Laporan Kinerja Triwula
- g) DIPA/POK 2023
- h) Pohon Kinerja dan Cascading
- i) LHE dan Tindak Lanjutnya
- j) Pedoman Teknis Perencanaan
- k) Pedoman Teknis Pengukuran
- l) Pedoman Evaluasi

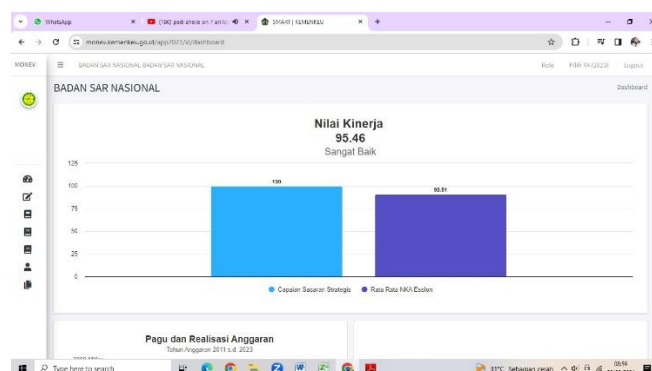
3) Indikator Nilai atas Evaluasi Kinerja Anggaran

Pengukuran indikator kinerja ini merupakan nilai capaian pada aplikasi SMART. Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi keuangan lainnya dan menyajikan informasi-

informasi terkait realisasi anggaran, keluaran, capaiam indikator keluaran, serta capaian indikator sasaran.

Pengisian aplikasi SMART-DJA dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja, tingkat unit eselon 1 sampai dengan tingkat lembaga. Selain itu aplikasi tersebut diisi secara berkala yaitu setiap bulan. Sehingga dari aplikasi tersebut DJA Kementerian Keuangan dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran dari tiap-tiap kementerian dan lembaga.

Terkait Pemantauan pencapaian Indikator Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART), Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan Pemantauan terhadap seluruh UPT dan Unit Kerja di kantor Pusat, baik pemantauan di Aplikasi, melalui *Virtual Meeting* maupun Monitoring langsung pada beberapa Kantor Unit Pelayanan Teknis sebagai uji petik. Hasil nilai kinerja pada aplikasi SMART Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah 95,46 pada Tahun 2023



Gambar 3.3 Hasil Nilai NKA

b. Analisis Capaian untuk Sasaran Kegiatan 1 (SK 1)

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.4 Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	72	73,72	102,39%
	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	95,46	100,48%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan:

- a) Indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan capaiannya sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%;
- b) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja capaiannya sebesar 102,39% dengan realisasi sebesar 73,72 dari target 72;
- c) Capaiannya sebesar 100,48% Realisasi Indikator Nilai atas Evaluasi Kinerja Anggaran sebesar 95,46 dari target 95.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	NA	NA	NA
	2020	NA	NA	NA
	2021	70	71,84	102,30%
	2022	73	68,38	93,67
	2023	100%	100%	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	70,3	62,51	88,91%
	2020	70,3	64,34	91,52
	2021	70,3	65,15	92,67%
	2022	70,5	72,86	103,35%
	2023	72	73,72	102,39
Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	2020	94	94,82	100,87%
	2021	94	93,8	99,79%
	2022	94	93,33	99,29%
	2023	95	95,46	100,48%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatkan evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan:

- a) Indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan naik karena terus berupaya mendorong UPT dan Satker terus melakukan penginputan.
- b) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c) Indikator Nilai atas evaluasi kinerja anggaran capaiannya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	NA	NA	NA
	2021	70	71,84	102,30%
	2022	73	68,38	93,67%
	2023	73	100%	100%
	2024	73		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	70,3	64,34	91,52
	2021	70,3	65,15	92,67%
	2022	70,5	72,86	103,35%
	2023	72	73,48	102,39%
	2024	73		
Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	2020	94		
	2021	94	93,8	99,79%
	2022	94	93,33	99,29
	2023	95	95,46	100,48%
	2024	95	-	-

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan ada standar nasional. Untuk Nilai SAKIP dan NKA Standar tinggi adala 100.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan untuk Tahun 2022 ada yang mengalami penurunan dan kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Melaksanakan sosialisasi terus menerus untuk pengisian aplikasi pemantauan kinerja yang merupakan salah satu kategori penilaian UPT, Input Aplikasi aplikasi seperti : Aplikasi *e-Performance*, Aplikasi Smart-DJA, Aplikasi eMonev Bappenas dan ESR Kemenpan
- Adanya asistensi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait dengan penyusunan dokumen SAKIP.
- Pada Tahun 2023 , Basarnas telah melaksanakan transformasi SKP , dari Manual ke Aplikasi E Kinerja BKN. Transformasi SKP sesuai dengan Peraturan Menteri Menpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai untuk pegawai Basarnas.
- Pada Tahun 2023 Basarnas juga telah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Menpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai untuk pegawai Basarnas Penilaian BerAKHLAK dan adanya Capaian Kinerja Organisasi, Distribusi Capaian Kinerja dan SKP Individu

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan berbagai upaya efisiensi . Dari perspektif pelaksanaan kegiatan Monitoring, Penyusunan Dokumen SAKIP, Sosialisasi Capaian Kinerja Organisasi dan Pelaporan-pelaporan telah dilaksanakan sesuai target Tahunan dan Triwulan, dan ealisasi juga telah mencapai target. penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
 - Pembinaan sumber daya manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi
 - Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas melalui Bimbingan Teknis maupun Belajar Mandiri
 - Mengoptimalkan sumber daya manusia.
 - Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik.
 -
- 7) Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut:
- Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
 - Rapat Kerja Basarnas
 - Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja
 - Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan
 - Melaksanakan BenchMarking ke DKP Pemprov. Bandung terkait adanya aplikasi terkait SKP dan Manajemen Kinerja
- Program Dukungan Manajemen sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian Pertolongan. Aktivitas selama Tahun 2023. Berikut ini adalah aktivitas dalam program Dukungan Manajemen

Tabel 3.7 Kegiatan dan Aktivitas dalam mendukung Sasaran 1

Kegiatan yang Mendukung Sasaran dan Indikator 1	Kegiatan di Triwulan I	Kegiatan di Triwulan II
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	Telah dilaksanakan pemantauan terhadap 45 Satker periode TW 1 2023 melalui aplikasi Internal dan eksternal (SMART-DJA dan E-Monev Bappenas) Telah dilaksanakan studi banding SAKIP ke Pemprov Jabar pada 17 Februari 2023	Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Rencana Aksi/trajectory target di lingkungan UPT di Denpasar 25-27 Mei 2023. Telah pemantauan terhadap 45 Satker melalui aplikasi SMART DJA dan EMONEV Bappenas Triwulan 2 Tahun 2023.
Rapat Kerja Basarnas	Telah dilaksanakan Rapat Kerja (Raker) Basarnas Tahun 2023 pada tanggal 14 s.d. 16 Februari 2023 di Gd. Basarnas Pusat	Rapat Kerja Basarnas Tahun 2023 telah dilaksanakan di Triwulan 1 Tahun 2023

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan 2023

Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	<p>Telah dilaksanakan penyusunan, Laporan Kegiatan ke Presiden Tw 4 Tahun 2022,</p> <p>Telah dilaksanakan penginputan data pada Aplikasi SMART DJA Tw 1 Tahun 2023</p>	<p>Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Capaian Tahun 2022, Laporan Kegiatan ke Presiden Tw 4 2022, dan Laporan Kegiatan ke Presiden Semester 1 2023</p> <p>Telah dilaksanakan asistensi tata cara penyampaian capaian kinerja periodik di lingkungan UPT Basarnas</p> <p>Telah dilaksanakan penginputan data pada Aplikasi SMART DJA Tw 2 Tahun 2023</p>
Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja	<p>Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Basarnas, Dokumen Perjanjian Kinerja Basarnas serta dokumen SAKIP Basarnas lainnya.</p> <p>Serta telah dilaksanakan asistensi penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Dokumen SAKIP lainnya untuk UPT dan Unit Eselon I dan II Kantor Pusat.</p>	Penyusunan Dokumen SAKIP telah selesai di Triwulan 1 Tahun 2023

Kegiatan yang Mendukung Sasaran dan Indikator 1	Kegiatan di Triwulan III	Kegiatan di Triwulan IV
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	<p>Telah pemantauan terhadap 45 Satker melalui aplikasi SMART DJA dan EMONEV Bappenas Triwulan 3 Tahun 2023.</p> <p>Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan T.A. 2023 di Kansar Sorong pada tanggal 11- 15 September 2023, Kansar Makasar pada tanggal 11-12 September 2023, Kansar Biak pada tanggal 13-15 September 2023, dan Kansar Yogyakarta pada tanggal 20-22 September 2023.</p>	<p>Kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan T.A. 2023 dan Pemantauan Capaian Kinerja UPT di Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon dilaksanakan pada tanggal 9-12 Oktober 2023, Surabaya dilaksanakan pada tanggal 9-11 Oktober 2023, Mataram dilaksanakan pada tanggal 12- 14 Oktober 2023, Jayapura dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober – 3 November 2023, Manado dilaksanakan pada tanggal 1 – 4 November 2023, Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 8-10 November 2023, Batam dilaksanakan pada tanggal 12-15 November 2023, Mataram dilaksanakan pada tanggal 6-8 Desember</p>
Rapat Kerja Basarnas	Rapat Kerja Basarnas Tahun 2023 telah dilaksanakan di Triwulan 1 Tahun 2023	telah dilaksanakan di TW1
Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	<p>Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Kegiatan ke Presiden periode Bulan Juli s.d. September 2023.</p> <p>Telah dilaksanakan kegiatan Asistensi tata cara penyampaian capaian kinerja periodik dan reviu IKU dan manual IKU Kantor Pusat pada tanggal 4 s.d. 6 September 2023.</p> <p>Telah dilaksanakan penginputan data pada Aplikasi SMART DJA TW 3 Tahun 2023</p>	Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Kepada Presiden RI Periode Oktober – Desember 2023
Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja	Penyusunan Dokumen SAKIP telah selesai di Triwulan 1 Tahun 2023	<p>Kegiatan Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Periodik TW III thn 2023 unit Kerja Kantor Pusat tgl 21-24 November 2023,</p> <p>Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Periodik dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja UPT Anggaran Triwulan III Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 19 Oktober 2023 di Denpasar dan Penyusunan LAKIP Periodik di lingkungan Sestama tgl 29 November - 1 Desember 2023</p>

2. Sasaran Kedua yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lembaga”

a. Capaian

Sasaran ini didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA, Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program,. Adapun capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.8 Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	<5%	<5%	<5%
	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%

Dalam rangka mendukung sasaran di atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Rencana dan Program beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan rencana kerja yang baik dan benar dengan mengacu kepada arah kebijakan dan direktif presiden melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat meminimalisir blokir anggaran. Pemblokiran anggaran menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Beberapa penyebab anggaran masuk dalam Catatan Halaman IV DIPA atau dibintangi akibat kesalahan dalam perencanaan, antara lain data dukung yang kurang lengkap, proporsi anggaran yang kurang tepat, penelahaan dilakukan secara on-line dan waktu yang singkat, mengakibatkan penjelasan pada waktu pendalaman terhadap kegiatan-kegiatan yang disampaikan belum maksimal. Tujuan dari pengukuran indikator ini yaitu Untuk mengetahui sejauh mana unit kerja dan UPT menerapkan peraturan terkait pengusulan anggaran unit kerja dan UPT antara lain berupa kelengkapan data dukung dan dokumen lain yang diperlukan dalam pengusulan anggaran.

- 2) Indikator Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program Penyusunan RKA-KL dimulai dengan penyusunan Pagu Kebutuhan, yang merupakan penggambaran kebutuhan anggaran dari masing-masing UPT dan digabungkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan mengacu pada Renstra dan RKP. Kemudian dilanjutkan dengan Pagu Indikatif yang merupakan indikasi awal kebutuhan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai ditahun yang akan datang. Selanjutnya disusun Pagu Anggaran yang merupakan rincian anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/ atau pembiayaan anggaran dalam APBN. Sebelum dikeluarkan Pagu Alokasi Anggaran maka dilakukan Trilateral Meeting kedua untuk memastikan anggaran yang diberikan mempunyai komposisi yang pas dalam membiayai kegiatan pemerintah. Pagu Alokasi Anggaran merupakan kegiatan akhir

dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL). Pagu Alokasi Anggaran merupakan acuan dalam penyusunan APBN di tahun yang akan datang.

KRISNA merupakan singkatan dari “Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran”. Sistem Informasi Krisna digunakan untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan informasi kinerja. Saat ini Krisna memiliki 10 sub sistem di dalamnya, termasuk Krisna-Renja K/L yang digunakan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L).

Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Kementerian/ Lembaga dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) serta disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renja K/L memuat substansi :

- Visi dan Misi;
- Sasaran : Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan;
- Program : Program Spesifik/ Program Lintas;
- Kegiatan : Kegiatan Spesifik/ Kegiatan Lintas;
- Output : KRO dan RO;
- Lokasi;
- Komponen dan Indikasi Pendanaan.

Tahapan penyusunan Renja K/L :

- Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L;
- Penyusunan Rancangan Renja K/L;
- Pemutakhiran Rancangan Renja K/L.

Melalui Sistem Informasi Krisna, Renja K/L disusun dan ditelaah serta menjadi referensi dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L)

Proses penyusunannya terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- Penyusunan RKA-K/L Pagu Kebutuhan;
- Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif;
- Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran; dan
- Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran

Untuk Pencapaian Indikator Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program dilihat seberapa besar keterlambatan yang dilakukan oleh UPT dan Unit Kerja Kantor Pusat, mengingat penyusunan DIPA di tahun yang akan datang dilalui oleh proses yang cukup panjang dan proses keterlambatan tersebut akan menyebabkan efek domino yang panjang. Sampai dengan Triwulan IV, seluruh Satuan Kerja wajib menyerahkan Pagu Indikatif untuk diinput di aplikasi oleh Substansi Rencana Program.

Tabel 3.9 Jumlah Satker yang tepat waktu pengumpulan data

Satker	Jumlah	Satker tepat Waktu	Persentase
UPT	44	44	100%
Unit Kerja Kantor Pusat	13	13	100%

Indikator Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program. Penyusunan RKA-KL dimulai dengan penyusunan Pagu Kebutuhan, yang merupakan penggambaran kebutuhan anggaran dari masing-masing UPT dan digabungkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan mengacu pada Renstra dan RKP. Kemudian dilanjutkan dengan Pagu Indikatif yang merupakan indikasi awal kebutuhan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai ditahun yang akan datang

b. Analisis Capaian untuk Sasaran Kegiatan 2 (SK 2)

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.10 Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	<5%	<5%	<5%
	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan lembaga telah mencapai targetnya.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK 2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	2020	<5%	<5%	<5%
	2021	<5%	<5%	<5%
	2022	<5%	<5%	<5%
	2023			
Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	2019	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatkan evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan:

- a) Capaian Indikator Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA pada Tahun 2023 sesuai target. Artinya kelengkapan administrasi pengajuan anggaran telah dilaksanakan lengkap administrasi
 - b) Indikator Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program target tercapai baik Tahun 2023 maupun tahun sebelumnya.
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK 2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	2020	<5%	<5%	<5%
	2021	<5%	<5%	<5%
	2022	<5%	<5%	<5%
	2023	<5%	<5%	<5%
	2024	<5%		
Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%		

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan lembaga tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan Untuk

pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga untuk Tahun 2021 relatif realisasinya memenuhi target. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- dilaksanakan asistensi dan pendampingan dalam rangka pengajuan RKA-KL
- dilaksanakan sosialisasi terkait pengisian aplikasi RKA-KL

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2022 Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan sumber daya manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment di Basarnas.
- Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas.
- Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik.

7) Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan penyusunan laporan analisa IKPA pada aspek kualitas perencanaan anggaran, indikator Deviasi Halaman III DIPA triwulanan
- Penyusunan RKAKL Basarnas
- Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas

Koordinasi perencanaan Basarnas dilaksanakan kepada Unit Kerja internal di lingkungan Basarnas; dengan lembaga pemerintah berpotensi SAR seperti Kementerian, Lembaga, TNI-Polri, Pemerintahan Daerah, dan masyarakat dan dengan Lembaga Legislatif yaitu Komisi V DPR-RI. Kegiatan ini sangat

penting untuk mencatat usulan, saran dan masukan bagi Basarnas yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan peningkatan rencana kerja di waktu yang akan datang

Tabel 3.13 Kegiatan dan Aktivitas dalam mendukung Sasaran 2

Kegiatan yang Mendukung Sasaran dan Indikator 1	Kegiatan di Triwulan I	Kegiatan di Triwulan II
Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas	Telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 8 dan 15 Februari 2023. Kunjungan Kerja reses sebanyak 2 kali yaitu Kunjungan kerja reses ke Provinsi Sulawesi Selatan dan Papua Selatan.	Telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 4 April, 24 Mei dan 30 Mei 2023. Kunjungan Kerja Spesifik sebanyak 4 kali yaitu Kunjungan kerja Spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Bali dan Kalimantan Selatan.
Rancangan Teknokratik Renstra Basarnas Tahun 2025-2029	-	Telah ditandatangani kontrak dengan PT. Arofrasa Victorindo sebagai pihak konsultan pada tanggal 5 Mei 2023 dengan nomor: 01/PPK-01/PERJV/REN-2023. Saat ini sudah disusun laporan pendahuluan dan sudah dilaksanakan wawancara kepada pihak internal dan eksternal untuk menggali data dan informasi
Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL	Telah disusun pagu kebutuhan pada tanggal 31 Jan-2 Feb 2023 di Bandung. Telah dilaksanakan kunjungan lapangan untuk penyusunan pagu kebutuhan TA 2024 ke KPP Mamuju dan Pos PP Polewali Mandar, KPP Palu pada tanggal 20-24 Februari 2023	Telah dilaksanakan kunjungan lapangan untuk penyusunan pagu kebutuhan TA 2024 ke KPP Banjarmasin dan Unit Siaga Tabalong, KPP Maumere dan Pos PP Labuan Bajo, KPP Pontianak dan Unit Kayong Utara, KPP Mentawai, KPP Tarakan, Palangkaraya, Temate dan Balikpapan pada tanggal 7 Maret-12 April 2023.
Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran	-	telah dilaksanakan sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran pada tanggal 8 -12 Mei di Mataram. Telah dilaksanakan Penyusunan Rancangan Krisna-Renja Basarnas TA 2024 tgl 24-27 Mei 2023 di Bogor. Telah dilaksnakan Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Basarnas TA 2024 tgl 29 Mei-1 Juni 2023 di Bogor.
Kegiatan yang Mendukung Sasaran dan Indikator 1	Kegiatan di Triwulan III	Kegiatan di Triwulan IV
Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas	Telah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 16-18 Juli 2023, Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Riau Tanggal 16-18 Juli 2023, Penyusunan Krisna Renja TA 2024 tgl 24-29 Juli 2023, Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 6-8 Agustus 2023, Peninjauan Lapangan RKA-KL ke KPP Ambon Tanggal 8-11 Agustus 2023, Peninjauan Lapangan RKA-KL ke KPP Kendari dan Pos PP Wakatobi 13-16 Agustus 2023, Peninjauan Lapangan RKA-KL ke KPP Gorontalo dan Pos Marisa 22-25 Agustus 2023, Peninjauan Lapangan RKA-KL ke KPP Medan dan Pos PP Danau Toba 29 Agustus-1 September 2023, Penyusunan Laporan Rapat Koordinasi Semester 1 Tahun 2023 di KPP Yogyakarta tanggal 5-9 September 2023, Peninjauan Lapangan RKA-KL ke KPP Pangkalpinang dan Pos PP Belitung Tanggal 12-15 September 2023.	Penyusunan Laporan Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas Semester II Tahun 2023 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung berangkat dari tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023, Penyusunan Rolling Plan Basarnas TA 2025 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung berangkat dari tanggal 29 November s.d. 1 Desember 2023, Rapat Koordinasi dan Tindak Lanjut Kesepakatan Lintas K/L dan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah berangkat dari tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2023, Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 11-13 Oktober 2023

Kegiatan yang Mendukung Sasaran dan Indikator 1	Kegiatan di Triwulan III	Kegiatan di Triwulan IV
Rancangan Teknokratik Renstra Basarnas Tahun 2025-2029	Telah selesai dilaksanakan per tanggal 5 Oktober 2023.	Telah selesai dilaksanakan per tanggal 5 Oktober 2023.
Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL	Telah dilaksanakan kegiatan Peninjauan Lapangan RKA-KL ke KPP Ambon Tanggal 8-11 Agustus 2023, Peninjauan Lapangan RKA-KL ke KPP Merauke 9-11 Agustus 2023, Peninjauan Lapangan RKA-KL ke KPP Kendari 14-16 Agustus 2023, Peninjauan Lapangan RKA-KL ke KPP Manokwari 22-25 Agustus 2023, Peninjauan Lapangan RKA-KL ke KPP Medan 29 Agustus- 1 Sep 2023, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2025 di Malang tanggal 11 dan 15 September 2023, Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran TA 2023 oleh Kementerian Keuangan di KPP Balikpapan tanggal 25-27 September 2023.	Kegiatan Penelaahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024 Kantor Pusat pada tanggal 9 s.d. 14 Oktober 2023 di Bogor, 1. Telah dilaksanakan kegiatan Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024 tgl 2,6 dan 7 oktober 2023, Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024 tgl 2-3 oktober 2023, Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024 tgl 3-5 oktober 2023, Sinkronisasi Renja-RKA dan Finalisasi RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2024 30 Okt-4 Nov
Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran	Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran TA 2024 di Lingkungan Basarnas tgl 8-12 Mei 2023	Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran TA 2024 di Lingkungan Basarnas tgl 8-12 Mei 2023

Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)

Basarnas mengusulkan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri berupa Rigid Buoyancu Boat (RBB) dalam DRPPLN/Green Book Tahun 2023. Basarnas telah mengirimkan kriteria kesiapan RBB ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas sebagai bahan pertimbangan. Rapat mengenai usulan Basarnas tersebut telah dilaksanakan secara intens. Saat ini, kami masih menunggu keluarnya Daftar Kegiatan (DK) dari Bappenas. DK tersebut akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR (DJPPR) kementerian Keuangan untuk proses penetapan Sumber Pembiayaan (SP).

3. Sasaran Ketiga yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel”

a. Capaian

Sasaran ini didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP , Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN , Opini BPK RI

atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Adapun capaian indicator untuk sasaran 1 tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.14 Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK 3)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80%	94%	117,5%
	Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	92,56	108,89%
	Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBP	100	643%	643%
	Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan” didukung oleh Indikator Kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP

Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil audit APIP, capaian kinerja sebesar **“94%”** target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebesar **“80%”**. Penjabaran capaian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut.

Capaian indikator kinerja Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil audit APIP, dilakukan dengan metode penatausahaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI untuk dikumpulkan dan didokumentasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Berkas tindak lanjut beserta bukti-bukti pendukungnya ditatausahakan dan disimpan.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP atas Laporan Keuangan Basarnas sampai dengan Tahun Anggaran 2022 atas 12 LHP dengan 114 temuan pemeriksaan senilai Rp131.829.124.661,37 dengan 316 rekomendasi senilai Rp84.837.115.972,31, menunjukkan status tindak lanjut yang telah dilaksanakan Basarnas adalah sebagai berikut

- Sesuai rekomendasi sebanyak 286 rekomendasi (90,51) dengan nilai Rp57.415.801.872,71 (67,68%);
- Belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 21 rekomendasi (6,64%) dengan nilai Rp27.421.314.099,60 (32,32%);
- Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 7 rekomendasi (2,22%) senilai nihil; dan
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 2 rekomendasi (0,63%) senilai nihil

2) Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun hasil penilaian SAKIP Tahun 2023 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .

$$Nilai\ IKPA = \sum_{n=1}^8 (Nilai\ Indikator\ n \times Bobot\ Indikator\ n) : Konversi\ Bobot$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

3.4. NILAI IKPA

Nilai IKPA tersebut merupakan hasil konsolidasi dari 46 satker di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan anggaran yang dapat dipantau melalui Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran (OM SPAN). Pelaksanaan Anggaran terdapat 3 (tiga) aspek pengukuran dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Berikut merupakan hasil monitoring dan evaluasi dari masing-masing aspek pengukuran beserta langkah-langkah meningkatkan Nilai IKPA langkah-langkah untuk melakukan optimalisasi kinerja RPD antara lain :

- Melakukan reviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
- Mengidentifikasi dan menghitung target nominal penyerapan anggaran triwulan berkenaan;
- Mengutamakan RPD atas sisa pagu anggaran neto/efektif (mengesampingkan pagu blokir);
- Mengidentifikasi dan memprioritaskan RPD untuk belanja kontraktual, termasuk rencana pembayaran kontrak yang akan jatuh tempo;
- Menyusun RPD untuk belanja-belanja operasional yang bersifat rutin (kegiatan regular);
- Menyusun RPD atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berkenaan dan;
- Mengeksekusi kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terhadap kegiatan yang belum pasti jadwal pelaksanaannya, hendaknya, rencana penarikan dana di letakkan pada bulan-bulan akhir tahun anggaran sehingga tidak mempengaruhi target penyerapan anggaran

Langkah-langkah strategis untuk melakukan optimalisasi pencapaian indikator penyerapan anggaran antara lain yaitu :

- Memperbaiki perencanaan dan mengeksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;
- Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun

langkah-langkah lain optimalisasi pengelolaan UP dan TUP seperti :

- Menghitung dengan cermat kebutuhan UP secara rasional, perhatikan pola realisasi belanja pada bulan-bulan sebelumnya untuk UP, dan kebutuhan mendesak untuk TUP.
- Mengidentifikasi kemampuan dalam merevolving UP serta mempertanggungjawabkan TUP.
- Jika UP terlalu besar yang membuat frekuensi revolving semakin panjang maka perlu dipertimbangkan untuk mengurangi jumlah outstanding UP.
- Dibutuhkan pengendalian yang baik atas UP-TUP termasuk dengan segera mempertanggungjawabkan penggunaan UP-TUP kepada KPPN tepat waktu.
- Mengoptimalkan pembayaran dengan mekanisme Langsung (LS), dana PNBP, dan/atau penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Nilai indikator kinerja dispensasi SPM sampai bulan Juni 2023 adalah 100. Satker perlu menjaga nilai tersebut sampai dengan akhir tahun dengan melakukan langkah-langkah berikut :

- Memonitor progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dan menyiapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran.
- Penyampaian SPM hendaknya tidak melewati batas-batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.
- Meningkatkan konsolidasi internal dalam pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian tagihan-tagihan tepat waktu.
- Koordinasi dengan KPPN dan Kanwil DJPb apabila mengalami kendala teknis dalam pelaksanaan anggaran di lapangan.

3) Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNB
Untuk Pencapaian Indikator Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNB keterangan sebagai berikut :

Dalam hal pelaksanaan anggaran telah dilakukan berbagai perbaikan untuk tetap menjaga capaian realisasi PNB, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Target PNB Basarnas 1.439.855.442 realisasi per 01 September 2023 adalah sebesar Rp 4.326.729.067 atau sebesar 643% Sub anggaran juga telah melakukan penyelesaian revisi anggaran sesuai dengan tingkat kewenangan baik DIPA Pusat maupun UPT

Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan dengan konsolidasi seluruh satker ke tingkat Lembaga. Saat ini Keuangan akan Menyusun PMK dan mengusulkan izin penggunaan tentang jenis dan tarif atas PNB yang bersifat Volatil atas pelatihan potensi bidang pencarian dan pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

4) Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



Gambar 3.5 Nilai Opini BPK

b. Analisis Capaian untuk Sasaran Kegiatan 3 (SK 3)

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.15 Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80%	94%	117,5%
	Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	92,56	108,89%
	Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN	100	643%	643%
	Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

d) Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP telah ditindaklanjuti sampai 94%, sehingga realisasi menjadi 117,5%

- e) Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dari target 85 mendapat angka 92,56, sehingga capaian menjadi 108,89%
 - f) Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN mencapai 643%
 - g) Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2023 atas pemeriksaan 2022 mendapatkan predikat WTP
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	2020	50%	91,32%	182,64
	2021	65%	83,02%	127,72
	2022	70%	94,30%	134,71
	2023	85%	94%	117,5%
Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	80	89,54	111,93
	2021	80	90,82	113,53
	2022	80	91,8	114,75
	2023	85	92,56	108,89%
Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN	2020	NA	NA	NA
	2021	NA	NA	NA
	2022	85%	100%	117,65
	2023	100	643%	643%
Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	WTP	WTP	100%
	2021	WTP	WTP	100%
	2022	WTP	WTP	100%
	2023	WTP	WTP	100%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan:

- d) Indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP.
- e) Indikator Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Capaian Kinerja mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- f) Indikator Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN.
- g) Indikator Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. indikator kinerja Opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas realisasi kinerjanya WTP memenuhi target kinerja WTP.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	2020	50%	91,32%	182,64
	2021	65%	83,02%	127,72
	2022	70%	94,30%	134,71
	2023	85%	94%	117,5%
	2024			
Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	80	89,54	111,93
	2021	80	90,82	113,53
	2022	80	91,8	114,75
	2023	85	92,56	108,89%
	2024			
Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN	2020	NA	NA	NA
	2021	NA	NA	NA
	2022	85%	100%	117,65
	2023	100	643%	643%
	2024			
Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional	2020	WTP	WTP	100%
	2021	WTP	WTP	100%

Pencarian dan Pertolongan	2022	WTP	WTP	100%
	2023	WTP	WTP	100%
	2024			

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan ada standar nasional. Untuk Nilai SAKIP dan NKA Standar tinggi adala 100.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan, Berikut penyebab keberhasilan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

Target PNBPN tahun 2023 yaitu sebesar 1.439.855.442 dan realisasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar 8.070.775.409 atau sebesar 643% yang sebagian besar merupakan penerimaan dari TAYL sedangkan untuk target PNBPN Pelatihan Potensi sebesar Rp1.233.800.000 dengan izin penggunaan sebesar Rp 987.040.000 realisasi penerimaan hanya sebesar Rp323.730.000 atau sebesar 26,23% hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman dan sosialisasi terhadap PMK Volatil PNBPN dilingkungan Basarnas sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi terus kepada UPT untuk meningkatkan PNBPN dari masing masing UPT

Kendala yang dihadapi Basarnas dalam melaksanakan rekomendasi BPK antara lain kesulitan dalam koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait proses permohonan alih status tanah dan

bangunan Kantor Pusat Basarnas yang masih belum ada jawaban serta pengurusan penerbitan IMB bangunan lama. BPK merekomendasikan agar Kepala Basarnas untuk segera menginventarisasi dan mengambil Langkah strategis untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang belum selesai ditindaklanjuti terutama meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja Persentase implementasi pengelolaan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, antara lain:

- a) Keterbatasan verifikator keuangan di Bagian Perbendaharaan;
- b) Beban kerja yang cukup banyak terkait penyusunan pertanggungjawaban belanja pada Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Basarnas;
- c) Penyampaian LPJK dari UPT belum tepat waktu;
- d) Sekretaris PPK Kantor Pusat Basarnas belum melaksanakan verifikasi secara teliti;
- e) Belum ada SOP tentang verifikasi LPJK

7) .Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian Pertolongan. Aktivitas selama Tahun 2023. Berikut aktivitas dalam Program Dukungan Manajemen di bagian Keuangan

Tabel 3.17. Kegiatan dan Aktivitas dalam mendukung Sasaran 3

Indikator	Kegiatan Pendukung Sasaran dan Indikator	Keterangan Capaian Upaya Pendukung Sasaran
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	Perencanaan/ Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah	Perencanaan/Implementasi SAP berupa Belanja Honor Operasional Satuan Kerja belum dapat teralisasi sampai dengan Triwulan III karena ada Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Honorarium Kelompok Kerja UAKPA, UAPPA-E1 dan UAPA
Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Kegiatan masuk dalam Automatic Adjustment
	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 tingkat Satker, Eselon I dan Kementerian/Lembaga telah mengacu pada Standar Akuntansi. Pemerintahan (SAP) dan jadwal penyampaian Laporan Keuangan ke Menteri Keuangan tepat waktu.
	Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan	Melakukan pemantapan Sistem Akuntansi Instansi (SAK) pada Satuan Kerja Palangkaraya dan Tanjungpinang dalam rangka peningkatan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023.
	Pendampingan Tim Pemeriksa	Melaksanakan kegiatan Pendampingan dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Basarnas TA 2022 telah selesai dilaksanakan pada Semester II
	Peningkatan Kompetensi Penyusunan Laporan Keuangan	Peningkatan kompetensi Penyusunan Laporan Keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan melalui penguatan pemahaman akan kenadalan informasi laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.
	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan
	Publikasi Laporan Keuangan	Kegiatan masuk dalam Automatic Adjustment
	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 terkait dengan tata cara monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan.
Persentase Penerimaan Negara	Penyusunan Jenis dan tarif PNB	1. Sosialisasi Mekanisme Penggunaan PNB 2. Mengusulkan izin penggunaan tentang jenis dan tarif atas PNB yang bersifat Volatil atas pelatihan potensi

Indikator	Kegiatan Pendukung Sasaran dan Indikator	Keterangan Capaian Upaya Pendukung Sasaran
sesuai dengan peraturan PNBP		bidang pencarian dan pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Pengelolaan dan Evaluasi Revisi Anggaran	1. Menyelesaikan revisi anggaran sesuai dengan tingkat kewenangan baik DIPA Pusat maupun UPT 2. Pelaksanaan SOP Revisi dalam mencapai instrumen indikator IKPA
	Peningkatan Kompetensi Anggaran	Mengikuti e learning dan diklat
	Koordinasi Pelaksanaan Anggaran	terlaksananya kunjungan ke satker terkait penyampaian informasi pengelolaan anggaran, perubahan kebijakan, keberhasilan, kesulitan maupun langkah-langkah yang telah dilakukan selama tahun berjalan.
	Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran	Melaksanakan kegiatan rutin Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran
	Pembekalan Pengelola Anggaran	Melaksanakan Kegiatan Pembekalan Pengelola Anggaran
	Monitoring Bendahara Pengeluaran (Uji Petik)	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNBP
	Pengelolaan PNBP	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNBP
	Pengelolaan Rekening Pengeluaran Lingkup Basarnas	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Rekening Pengeluaran Lingkup Basarnas
	Pengelola Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan	Melaksanakan kegiatan Pengelola Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan
	Layanan Perkantoran	gaji,tunjangan dan honor
Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kantor Pusat	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kantor Pusat	

C. REALISASI ANGGARAN

Pada awal tahun Anggaran 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan Pagu awal sebesar Rp. 77.630.136.000,-

- a. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Rp. 2.010.000.000,-
- b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Rp. 2.726.060.000,-
- c. Layanan Keuangan Rp. 2.164.306.000

d. Gaji Honor dan Tunjangan Rp. 70.729.770.000,-

Berikut adalah table Realisasi Pelayanan KRO dan detail Kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja

Table 3.18 Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	KRO - RO	PAGU AKHIR	REALISASI	%
I	GAJI DAN HONOR	70.729.770.000	69.774.091.420	98,65
A	Gaji dan tunjangan	69.401.570.000	68.560.654.900	98,79
B	Honor Pengelola Anggaran	1.328.200.000	1.213.436.520	91,36
II	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.726.060.000	2.679.620.345	98,30
III	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.010.000.000	1.958.283.130	97,43
IV	Layanan Manajemen Keuangan	2.164.306.000	2.150.641.450	99,37
TOTAL		77.630.136.000	76.562.636.345	98,62

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Per Kegiatan / Aktivitas dalam Rencana Aksi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TRG PK 2023	REALSASI	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU birorenkeu 2023	TRG RO	ANGGARAN			
							AWAL	REV	REALS	%
1	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	1 dok	500.000.000	647.000.000	643.940.492	99,53
					Rapat Kerja Basamas	1 dok	300.000.000	250.000.000	249.171.000	99,67
					Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	1 dok	610.000.000	613.000.000	609.069.435	99,36
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	72	73,72	Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja	1 dok	500.000.000	500.000.000	456.102.203	91,22
					Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja	1 dok	100.000.000	AA		
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	44.1	Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	1 dok	610.000.000	613.000.000	609.069.435	99,36
2	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%	<5%	penyusunan laporan analisa IKPA pada aspek kualitas perencanaan anggaran, indikator Deviasi Halaman III DIPA	1 dok				
					Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas	1 dok	716.956.000	560.556.000	558.315.266	99,60
					Rancangan Teknokratik Renstra Basarnas Tahun 2025-2029	1 dok	500.000.000	500.000.000	465.478.500	93,10

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TRG PK 2023	REALSASI	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU birorenkeu 2023	TRG RO	ANGGARAN			
							AWAL	REV	REALS	%
					Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL	1 dok	1.263.640.000	1.418.940.000	1.415.067.513	99,73
					Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran	1 dok	280.464.000	246.564.000	240.759.066	97,65
					Pembinaan Aparatur Perencanaan		233.182.000	AA		
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL	1 dok	1.263.640.000	1.418.940.000	1.415.067.513	99,73
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	80	94	Perencanaan/ Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah	1 dok	88.016.000	60.640.000	60.640.000	100,00
			WTP	WTP	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)		48.000.000	AA		
					Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	144.000.000	294.010.000	293.670.340	99,88
					Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	91.546.000	91.546.000	91.370.967	99,81
					Pendampingan Tim Pemeriksa	1 dok	98.000.000	218.200.000	217.572.715	99,71
					Peningkatan Kompetensi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	25.334.000	25.334.000	25.333.530	100,00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TRG PK 2023	REALSASI	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU birorenkeu 2023	TRG RO	ANGGARAN			
							AWAL	REV	REALS	%
					Reviu Laporan Keuangan	1 dok	72.000.000	22.150.000	21.948.500	99,09
					Publikasi Laporan Keuangan		96.000.000	AA		
					Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	64.800.000	15.816.000	15.550.000	98,32
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBP	100%	643%	Penyusunan Jenis dan tarif PNBP	1 dok	223.000.000	267.520.000	267.421.548	99,96
		Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	92,56	Pengelolaan dan Evaluasi Revisi Anggaran	1 dok	238.086.000	201.086.000	200.891.177	99,90
					Peningkatan Kompetensi Anggaran	1 dok	28.800.000	28.800.000	28.780.000	99,93
					Koordinasi Pelaksanaan Anggaran	1 dok	213.540.000	191.020.000	187.516.349	98,17
					Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran	1 dok	280.000.000	345.000.000	344.430.029	99,83
					Pembekalan Pengelola Anggaran	1 dok	142.000.000	172.500.000	170.931.416	99,09
					Monitoring Bendahara Pengeluaran (Uji Petik)	1 dok	138.000.000	48.000.000	43.963.246	91,59
					Pengelolaan PNBP	1 dok	28.800.000	28.800.000	27.508.760	95,52
					Pengelolaan Rekening Pengeluaran Lingkup Basarnas	1 dok	24.384.000	24.384.000	24.191.390	99,21
					Pengelola Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan	1 dok	72.000.000	81.500.000	81.487.133	99,98

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TRG PK 2023	REALSASI	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU birorenkeu 2023	TRG RO	ANGGARAN			
							AWAL	REV	REALS	%
					Layanan Perkantoran	1 dok	241.705.0 94.000	70.729.770.000	69.774.918.105	98,65
					Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kantor Pusat	1 dok	48.000.000	48.000.000	47.434.350	98,82
								6.900.366.000	6.788.544.925	98,6

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara garis besar tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 dapat dikatakan memuaskan dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 163%. Realisasi Anggaran 98,6%, Capaian Output (RO) sebesar 100%. Pendapatan PNBPN Basarnas baru pertamakali dilaksanakan dan realisasinya melebihi yang telah ditargetkan sampai 643% menyebabkan realisasi Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi sangat baik.

B. CAPAIAN TERKAIT MANAJEMEN KINERJA ASN

Capaian yang paling besar adalah Basarnas **mendapat Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPP) Basarnas adalah 97,98** dr Kementerian Bappenas Tahun 2023.

Dari kementerian Keuangan :

- Opini BPK 12 kali berturut turut mendapatkan Predikat WTP
- Nilai IKPA adalah 92,56
- Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (NKA) 95,46

Dari kementerian PAN RB :

- Nilai Sakip yang pada Tahun 2023 naik menjadi 73,72 (BB)

Basarnas memperoleh penghargaan pada saat BKN Award Tahun 2022.

Penghargaan tersebut didapat untuk Katagori :

1. Juara Pertama untuk Katagori Manajemen ASN Terbaik
2. Juara Keempat untuk Katagori Penerapana Manajemen Kinerja

Hasil kerja ini adalah Kolaborasi antara Biro Perencanaan dan Keuangan (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Cascading Indikator Kinerja) dan Biro Kepegawaian dan Ortala terkait Penyusunan SKP sesuai dengan e Kinerja BKN yang dilaksanakan setiap Triwulan

Basarnas pada Tahun 2023 kembali mendapatkan penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penghargaan tersebut diberikan sebagai Lembaga Non Kementerian Tipe Besar untuk lima kategori yaitu:

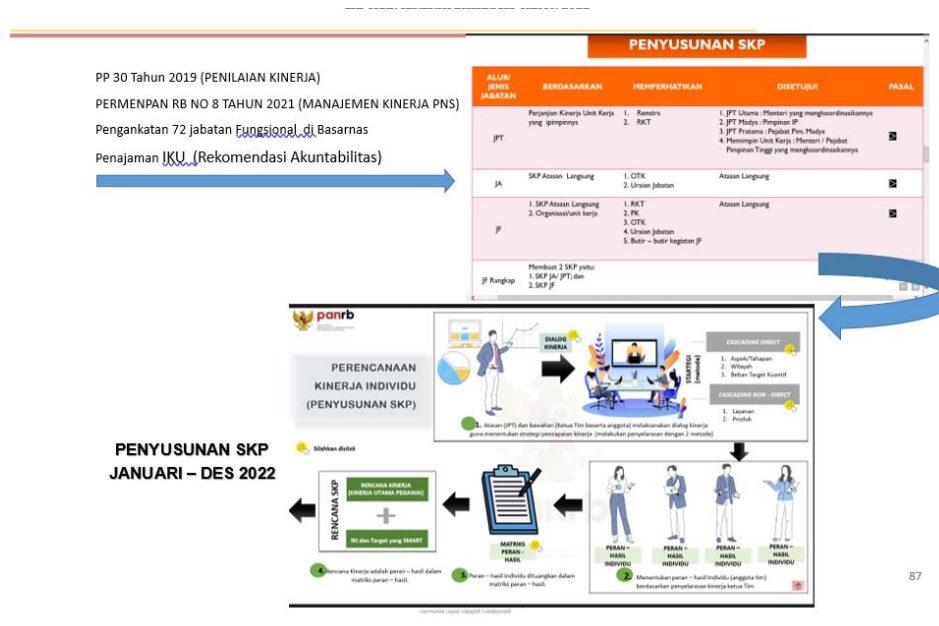
- a. Peringkat 1 untuk kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik;
- b. Peringkat 4 untuk kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja;

C. TRANSFORMASI SKP

Di dalam PP 46/2011 Jo Perka 1 Tahun 2013, SKP memuat kegiatan tugas jabatan berbasis aktivitas dan merupakan penyusunan kegiatan tugas jabatan berdasarkan tugas dan fungsi. Di dalam PP 30/2019 jo PERMENPANRB Sistem Manajemen Kinerja PNS SKP dan Transformasi SKP sesuai dengan Peraturan Menteri Menpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

1. Tahun 2023 telah dilaksanakan penyusunan dengan menggunakan Aplikasi E-BKN. PK menjadi Dasar dengan menggunakan Matriks Peran Hasil
2. Kinerja Utama Individu: Penjabaran kinerja berdasarkan *cascading* berbasis hasil berdasarkan dialog kinerja
3. Indikator Kinerja Individu: Memperhatikan Kriteria Spesifik, Terukur, Realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi.
4. Penyusunan SKP dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 *tentang* Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai untuk pegawai Basarnas. Pelaksanaan disusun setiap Triwulan, Capaian Kinerja Organisasi telah dilaksanakan secara Triwulan dengan sistem penilaian sesuai SE terkait
5. Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), SKP disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan Renstra dan RKT
6. Untuk Jabatan Administrasi, SKP disusun berdasarkan SKP Atasan Langsung dengan memperhatikan RKT dan PK atasan langsung

7. Untuk Jabatan Fungsional, SKP disusun berdasarkan SKP Atasan Langsung dan Organisasi/unit kerja dengan memperhatikan RKT dan Perjanjian Kinerja atasan langsung
8. Untuk Jabatan Fungsional yang merangkap Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan lainnya, SKP disusun mengikuti jabatan JPT, JA atau Jabatan lainnya dan dapat menyusun SKP JF



Gambar 4.2 Implementasi Penyusunan SKP

D. UPAYA PERBAIKAN CAPAIAN KINERJA

Menindaklanjuti hasil pengukuran capaian kinerja pada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk indikator kinerja yang realisasinya telah memenuhi target seluruh bidang di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan akan melaksanakan program dan kegiatan yang lebih baik sehingga keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat dipertahankan dan diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan untuk indikator kinerja yang realisasinya belum memenuhi target, Biro Perencanaan dan Keuangan akan mencoba menerapkan program dan kegiatan yang lebih baik lagi.

Untuk peningkatan capaian kinerja pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk

Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 melaksanakan kegiatan kegiatan :

- Sosialisasi tata Cara pengisian Form Capaian Kinerja Organisasi untuk mendapatkan Predikat pegawai kepada seluruh ASN Basarnas baik Pusat maupun daerah
- Menyusun SKP dengan dasar Capaian Kinerja Organisasi Tahunan dan Periodik
- Menyusun Laporan Kinerja Triwulan atas dasar capaian kinerja Rencana Aksi triwulan
- Asistensi terkait penyusunan dokumen AKIP/ SKP lebih baik lagi dengan pemantauan TRIWULAN (Monev Rencana Aksi)
- Penginputan Aplikasi E Performance dan SKP Berbasis Aplikasi
- Melaksanakan *Bench Marking* pada Tahun 2023 dengan Inspektorat Propinsi Bandung
- Pengisian SKP melalui E Kinerja BKN

Selain itu sebagai pendukung dalam tugas pelayanan pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Biro Perencanaan dan Keuangan perlu terus meningkatkan pelaksanaan tugasnya dengan lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan unsur-unsur lainnya baik di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan maupun di lingkungan Basarnas lainnya serta instansi/organisasi lain. Kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan dapat berlangsung secara maksimal.

E. TINDAK LANJUT HASIL EVALUSI AKIP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN oleh APIP BASARNAS

Tabel 4.1 Tindal Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi APIP

No.	Rekomendasi APIP	Rencana Aksi Tindak Lanjut Biro Renkeu
1.	Terdapat indikator kinerja yang belum relevan dengan sasaran yang diharapkan, sehingga	1. Telah disusun reuiu renstra pada tahun 2022 untuk mereviu SK.78/PR.02.02/II/ BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan

No.	Rekomendasi APIP	Rencana Aksi Tindak Lanjut Biro Renkeu
	<p>perlu dilakukan evaluasi pada indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART</p>	<p>Nasional Pencarian dan Pertolongan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Saat ini sedang disusun Renstra Teknokratik yang akan mengevaluasi terkait <i>cascading</i> dan <i>crosscutting</i> 3. Untuk memastikan indikator SMART dan cukup akan dilakukan evaluasi lebih lanjut bersama masing-masing unit kerja. 4. Reviu Renstra 2020-2024 masih dalam proses pengesahan di Kemenkumham. Setelah Reviu Renstra disahkan selanjutnya disusun Keputusan Kabasarnas tentang reviu IKU dan Manual IKU
<p>2.</p>	<p>Melakukan reviu internal secara berkala atas capaian target yang dihasilkan serta melibatkan pimpinan sebagai pengambil keputusan (<i>decision maker</i>)</p>	<p>Telah dilakukan reviu atas capaian kinerja setiap triwulan, sehingga target yang telah ditentukan dapat terpenuhi sesuai rencana. Melaksanakan evaluasi program dengan mengidentifikasi perubahan kondisi yang terjadi secara terukur sehingga dampak keberhasilan program yang telah ditetapkan terlihat dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.</p>
<p>3.</p>	<p>Dokumen Laporan kinerja agar mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja unit kerja</p>	<p>Laporan kinerja akan disusun lebih informatif sehingga pencapaian, kendala/permasalahan serta solusi tentang pencapaian kinerja dapat tergambar dengan jelas.</p>
<p>4.</p>	<p>Dokumen Laporan kinerja agar menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatannya</p>	<p>Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, membandingkan target dengan realisasi dan menghitung efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan kinerja. Selanjutnya, memanfaatkan laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.</p>
<p>5.</p>	<p>Setiap pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja</p>	<p>Telah dilaksanakan dialog kinerja sebagai dasar dari target kinerja masing-masing pegawai, dan telah dilaksanakan pemantauan atas kinerja secara berkala (triwulanan)</p>
<p>6.</p>	<p>Agar dilakukan evaluasi internal sehingga implementasi SAKIP memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja</p>	<p>Untuk pemanfaatan pengukuran kinerja pengambilan keputusan belum maksimal oleh karena itu akan direncanakan <i>expose</i> komunikasi organisasi pada seluruh Pimpinan organisasi agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.</p>

No.	Rekomendasi APIP	Rencana Aksi Tindak Lanjut Biro Renkeu
7.	Teknologi informasi yang ada agar dikembangkan sehingga efektif dalam melakukan evaluasi kinerja internal	Akan dilaksanakan penyempurnaan pada aplikasi <i>e-performance</i> yang terintegrasi dengan aplikasi kinerja pegawai sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja dan UPT dengan lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun. Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Biro Perencanaan dan Keuangan dan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis dimasa yang akan datang. Biro Perencanaan dan Keuangan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Daftar Pustaka

- Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*. Jakarta.
- Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Indonesia. 2016. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186*. Jakarta.
- Indonesia. 2016. *Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Indonesia. 2017. *Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SP-DIPA-107.01/2021 Tahun 2021*. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP*. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- *Peraturan Menteri Menpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan*
- *Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai untuk pegawai Basarnas*

LAMPIRAN

HASIL PENGUKURAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TA 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET PK	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100	100	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	72	73,72	102,39%
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	95,46	100,48%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%	<5%	100%
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100	100	100%
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80	94	117,5%
		Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	92,56	108,89%
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN	100	643%	643%
		Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

HASIL CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
 Jl. Angkasa Blok B. 15
 Kav. 2/3 Jakarta 10720
 https://basarnas.go.id
 E-mail: basarnas@basarnas.go.id

Telp : (021) 6570116 / 65867510
 Fax : (021) 6570112
 Emergency : 115 - (021) 65867511
 Emergency Fax : (021) 65867512

Nomor : B/321/PR.02.02/BSN-2024
 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Hal : Penetapan Predikat Kinerja Tahunan Organisasi Tahun 2023

Jakarta, 17 Januari

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
 di
 Jakarta

Menunjuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja ASN, perlu ditetapkan predikat kinerja organisasi sebagai dasar evaluasi kinerja pegawai di masing-masing unit kerja. Predikat kinerja organisasi tersebut diperoleh dari capaian indikator kinerja, ekspektasi pimpinan, serta upaya perubahan proses/inovasi yang berdampak pada peningkatan hasil kerja unit kerja.

Terkait hal di atas, terlampir disampaikan Penetapan Predikat Kinerja Tahunan Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023. Selanjutnya predikat kinerja dimaksud dapat digunakan sebagai dasar penetapan sebaran predikat kinerja individu.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,



Dr. Abdul Haris Achadi, SH, DESS
 Pembina Utama Madya (V/Id)

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,
Ditujukan di email: ditubangan@basarnas.go.id atau melalui Sistem Informasi Elektronik (SIE) BSN
2. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Lampiran Surat Sekretaris Utama
 Nomor : B/321/PR.02.02/BSN-2024
 Tanggal : 17 Januari 2024

PENETAPAN PREDIKAT KINERJA TAHUNAN PERIODE TAHUN 2023

NAMA SATUAN ORGANISASI	PREDIKAT KINERJA
Biro Perencanaan dan Keuangan	BAIK

HASIL (PK dan Delivery

Ekspektasi

A = diatas ekspektasi	Kurang	Baik	Istimewa
S = sesuai ekspektasi	Kurang	Baik	Baik
B = dibawah ekspektasi	Sangat Kurang	Butuh Perbaikan	Butuh Perbaikan
	B = dibawah ekspektasi	S = sesuai ekspektasi	A = diatas ekspektasi

PROSES

Sekretaris Utama,



Dr. Abdul Haris Achadi, SH, DESS
 Pembina Utama Madya (V/Id)